

## Belanja Modal- Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Jalan dan Jembatan Mamminasata



| Pembangunan ruas jalan dan jembatan Maros-Makassar-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) Segmen I dan II (Foto: Kementerian PUPR)

Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/nasional/810234/kementerian-pupr-percepat-pembangunan-jalan-dan-jembatan-mamminasata>

KBRN, Makassar: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat pembangunan jalan dan jembatan Maros-Makassar-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) Segmen I-II. Demikian disampaikan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Budi Amin, Senin (8/6/2024).

Menurut dia, pembangunan jalan sepanjang 3,9 kilometer dan jembatan sepanjang 128,6 meter menelan anggaran Rp119,7 miliar. "Progres konstruksinya telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung pada minggu ketiga Agustus 2024," ujarnya.

Budi Amin mengatakan ke depannya akan dikembangkan Jalan Bypass Mamminasata sepanjang 48,175 kilometer, Sulawesi Selatan. "Ini merupakan Proyek Prioritas (Pro-P) yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)," ujarnya.

Rencana pengembangan pembangunan Jalan Bypass Mamminasata dikerjakan secara bertahap. Proses pembebasan untuk Segmen III dan IV (9,85 kilometer) dimulai pada 2024-2025 dilanjutkan dengan pekerjaan fisik hingga 2027.

Kemudian pembebasan tanah untuk Segmen V (6,9 kilometer), VI (6,45 kilometer), dan VII (4,45 kilometer) dimulai pada 2026-2027. Sementara pembebasan tanah Segmen VIII (7,95 kilometer), IX (4,05 kilometer), dan X (4,07 kilometer) berlangsung pada 2027-2028.

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

#### 1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

#### 2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjaanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

#### 3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/nasional/810234/kementerian-pupr-percepat-pembangunan-jalan-dan-jembatan-mamminasata>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.